

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

KEGIATAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN
PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

A. PETUNJUK UMUM

- | | |
|---|---|
| 1. Dinas Instansi | : Bagian Hukum |
| 2. Program | : Penataan Peraturan Perundang-Undangan |
| 3. Nama Kegiatan | : Publikasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 4. Sifat Kegiatan | : Lama |
| 5. Bagian Belanja | : Belanja Langsung |
| 6. Jumlah Biaya Kegiatan | : Rp. 80.000.000,- |
| 7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan | : Januari s/d Desember 2019 |
| 8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | |
| a. Nama | : Erviyandi Faisal, SH |
| b. Jabatan | : Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum |
| 9. Bendahara Pembantu | |
| a. Nama | : Yuli Fitriani |
| b. Jabatan | : Bendahara Pembantu Lingkup Ass I |
| c. Lokasi Kegiatan | : Kabupaten Pesisir Selatan |
| 10. Tolak Ukur Indikator | |
| a. Masukan | |
| - Jumlah Dana | : Rp.80.000.000,- |
| - Waktu Pelaksanaan | : Januari s/d Desember 2019 |
| b. Keluaran | : Terlaksananya penyusunan buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah Tahun 2018. |
| c. Hasil | : tersedia dan tersebarluaskannya buku Lembaran daerah.dan Berita Daerah Tahun 2018 |
| 11. Rincian Biaya Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 sebagai berikut : | |

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan.

Maksud dari kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan adalah tersedianya dokumen Lembaran Daerah, Berita Daerah dan SJDI Hukum serta tersebarluaskannya/terpublikasikannya Produk Hukum Daerah pada stekholder/instansi terkait.

Tujuan dari program Penataan Peraturan Perundang-undangan pada kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan adalah terlaksananya penyusunan buku Lembaran Daerah dan penyusunan Buku Berita Daerah.

2. Landasan Hukum Kegiatan.

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- d. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 2 /Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- e. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: /Kpts/Sekda-PS/2018 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten pesisir Selatan nomor /Kpts/SEKDA-PS/2019 tentang Penetapan Tim Pelaksana Penyusunan dan Penyebarluasan Lembaran Daerah Tahun 2018, Berita

Daerah Tahun 2018, dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2019.

Penetapan Tim Pelaksana Penyusunan dan Penyebarluasan Lembaran Daerah Tahun 2018, Berita Daerah Tahun 2018, dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2019. sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pengarah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wakil Pengarah;
- c. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Ketua;
- d. Kasubbag Dokumentasi dan penyuluhan hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Sekretaris;
- e. Kasubbag Perundang-undangan dan Staf -staf Bagian Hukum sebagai Anggota;

3. Tugas Dan Tanggung Jawab.

Dengan mempedomani Keputusan Sekretaris Daerah dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Pengarah dan Wakil Pengarah.

Pengarah dan Wakil Pengarah bertugas memberikan arahan serta kebijakan atas materi/Produk Hukum yang perlu disusun dalam bentuk buku dan penyebarluasannya.

b. Ketua dan Sekretaris serta anggota.

Ketua, Sekretaris dan Anggota bertanggungjawab dan bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyebarluasan Produk Hukum yang dibuat dalam bentuk buku yang terdiri dari :

- Mencari, mengumpulkan dan menghimpun bahan berupa berupa Peraturan Daerah Tahun 2018 untuk dijadikan Buku Lembaran Daerah;
- Mencari, mengumpulkan dan menghimpun bahan berupa berupa Peraturan Bupati Tahun 2018 untuk dijadikan Buku Berita Daerah;

- Mencari, mengumpulkan dan menghimpun bahan berupa Peraturan Perundang-undangan untuk dijadikan Buku SJD Hukum;
- Melakukan pengetikan dan editor terhadap bahan yang telah terkumpul;
- Memperbanyak bahan hasil ketikan dan editor dalam bentuk buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- Mendistribusikan buku Lembaran Daerah, Buku Berita Daerah dan SJD Hukum kepada stekholder terkait;

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut:

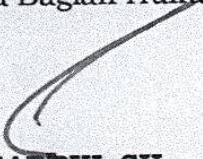
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Bendahara Pembantu.

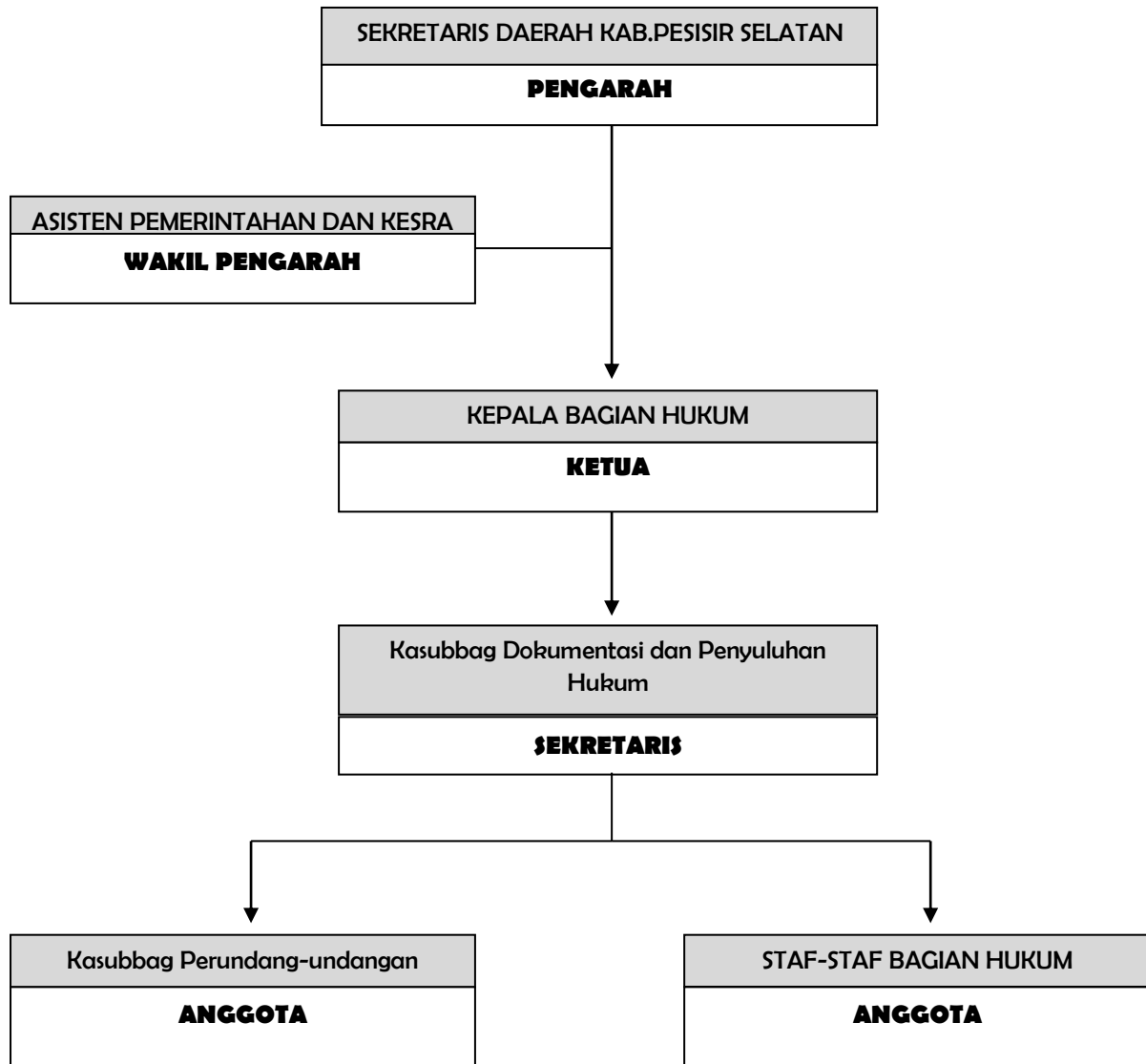
1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
2. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-SKPD
4. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
5. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-SKPD.
6. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan/Bank.
7. Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
8. Membuat dan menandatangani Buku Pajak.
9. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
10. Menandatangani Register Penutupan Kas.

11. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2019	
Disetujui oleh : Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Bagian Hukum  <u>SABRUL.SH</u> NIP.19651231 1986 1 033	Dibuat oleh : PPTK Kasubbag Dokumentasi Dan Penyuluhan Hukum  <u>ERVIYANDI FAISAL.SH</u> NIP.19810518 200701 1 006
 Diketahui Oleh: Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  <u>Ir.ERIZON.MT</u> NIP.19630323 199003 1 005 	

**KEGIATAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PESISIR SELATAN
Tahun Anggaran 2019**

Urusan	: Pemerintahan Umum
Organisasi	: Sekretariat Daerah
Program	: Penataan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan	: Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Waktu	: Januari s/d Desember 2019
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Pesisir Selatan

KLASIFIKASI KEGIATAN

1. Pembuatan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Pelaksana Penyusunan dan Penyebarluasan Lembaran Daerah Tahun 2018, Berita Daerah Tahun 2018, dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2019.
2. Membentuk program Penyebarluasan buku Lembaran Daerah Tahun 2018, buku Berita Daerah Tahun 2018, dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2019.
3. Menyiapkan bahan penerbitan Buku Lembaran Daerah dan Buku Berita Daerah Tahun 2018.
4. Melaksanakan Rapat pengelola kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Daerah dan SJDI Hukum .
5. Melaksanakan pembuatan Buku Lembaran Daerah dan buku Berita Daerah.
6. Melaksanakan pendistribusian penyebarluasan buku Lembaran Daerah dan buku Berita Daerah ke instansi terkait.
7. Pembuatan Laporan Akhir Tahun.

RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

A. RUANG LINGKUP

- Menyusun dan menyebarluaskan produk hukum Daerah bersifat pengaturan yang telah diundangkan pada tahun 2018.
- Serta penyebarluasan/mempublikasikan peraturan perundang-undangan.

B. JADWAL

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember tahun 2019.

C. TARGET

Terlaksananya penyusunan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah Tahun 2018..

D. LANGKAH KERJA

1. Menetapkan Tim Pelaksana Penyusunan dan Penyebarluasan Lembaran Daerah Tahun 2018, Berita Daerah Tahun 2018, dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2019:
2. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan dan penyebarluasan Produk Hukum yang dibuat dalam bentuk Buku yang terdiri dari:
 - Mencari, mengumpulkan dan menghimpun bahan berupa Peraturan Daerah Tahun 2018 untuk dijadikan buku Lembaran daerah.
 - Mencari, mengumpulkan dan menghimpun bahan berupa Peraturan Bupati Tahun 2018 untuk dijadikan buku Berita daerah.
 - Melakukan pengetikan dan editor terhadap bahan yang telah terkumpul.
 - Memperbanyak bahan hasil ketikan dan editor dalam bentuk buku Lembaran daerah dan buku Berita Daerah..
 - Mendistribusikan buku Lembaran Daerah, buku Berita Daerah dan SJDH Hukum kepada pihak terkait.

RINCIAN ANGGARAN KEG PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BELANJA	80.000.000
BELANJA LANGSUNG	80.000.000
BELANJA PEGAWAI	6.000.000
BELANJA BARANG DAN JASA	74.000.000
BELANJA BAHAN HABIS PAKAI	1.383.600
- Belanja Alat Tulis Kantor	1.248.600
- Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.400.000
BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	
- Belanja Cetak	13.500.000
- Belanja Penggandaan	25.116.400
BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	
- Belanja Rental Mobil	2.100.000
BELANJA PERJALANAN DINAS	25.500.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.900.000
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi	7.900.000

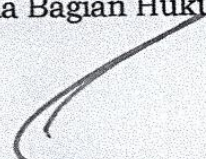
E. RENCANA RINCIAN PENGGUNAAN DANA

1. Triwulan I	Rp. 40.000.000,-
2. Triwulan II	Rp. 40.000.000,-
3. Triwulan III	Rp. -
4. Triwulan IV	Rp. -
Jumlah	Rp. 80.000.000,-

Painan, Januari 2019

Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bagian Hukum

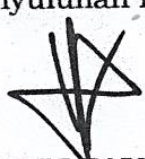

SABRUL.SH

NIP.19651231 1986 1 033

Dibuat oleh :

PPTK

Kasubbag Dokumentasi
Dan Penyuluhan Hukum


ERVYANDI FAISAL.SH

NIP.19810518 200701 1 006

Diketahui Oleh:
Sekretaris Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


Ir.ERIZON.MT
NIP.19630323 199003 1 005

